



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Jl. Ahmad Yani No. 252

Pontianak - Kalimantan Barat 78124

Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173

e-mail : pontianak_pta@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.AHMAD YANI No. 252

Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173

PONTIANAK - Kalimantan Barat 78124

e-mail : pta.pontianak@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

PONTIANAK, 10 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



NAFFI, S.Ag., M.H.

NIP.197012011999031004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	8
III. Laporan Operasional.....	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum.....	15
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.....	15
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.3. Basis Akuntansi	17
A.4. Dasar Pengukuran	17
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	25
B.2. Belanja.....	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
C.1. Aset Lancar	32
C.2. Aset Tetap.....	34
C.3. Aset Lainnya.....	38
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	39
C.6. Ekuitas	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	41
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	41
D.2. Beban Pegawai.....	41

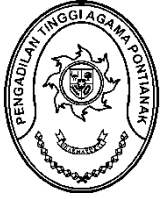
D.3.	Beban Persediaan.....	42
D.4.	Beban Barang dan Jasa	42
D.5.	Beban Pemeliharaan	43
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	44
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	44
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	44
D.9.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	45
D.10.	Beban Lain-lain.....	45
D.11.	Kegiatan Non Operasional	45
D.12.	Pos Luar Biasa.....	46
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
E.1.	Ekuitas Awal.....	47
E.2.	Surplus (defisit) LO	47
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	47
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	47
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	47
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	47
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	48
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	48
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	48
E.3.	Ekuitas Akhir	48
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	49
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	49
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	49
	Laporan-laporan Pendukung.....	51
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	52

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017	2
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018	25
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017	26
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	27
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	27
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	28
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	29
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	30
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	31
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017	32
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	32
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka	33
Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017	34
Tabel 15 Rincian Aset Tetap	35
Tabel 16 Rincian Saldo Tanah	35
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
Tabel 18 Rincian Aset Lainnya	38
Tabel 19 Rincian Aset tak Berwujud	39
Tabel 20. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017	39
Tabel 21 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2018 dan 2017	40
Tabel 22 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2018 dan 2017	43
Tabel 23 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017	43
Tabel 24 Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2018 dan 2017	44
Tabel 25 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2018 dan 2017	44
Tabel 26 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2018 dan 2017	45
Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2018 dan 2017	46
Tabel 28 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2018 dan 2017	47
Tabel 29 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni 2018 dan 2017	49
Tabel 30 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2018	54

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Jl.AHMAD YANI No. 252 PONTIANAK - Kalimantan Barat 78124

Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173 e-mail : pontianak_pta@yahoo.co.id

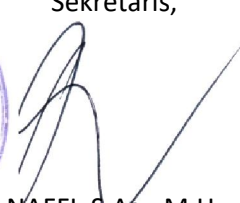
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

PONTIANAK, 10 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,




NAFFI, S.Ag., M.H.

NIP.197012011999031004

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Semester I Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.12.310.830 atau mencapai 41,52 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.29.652.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp.4.416.808.878 atau mencapai 42,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.10.449.242.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	29.652.000	12.310.830	41,52	17.942.529
Belanja Negara	10.449.242.000	4.416.808.878	42,27	4.895.074.034

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.56.675.963.463 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.60.267.800; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.56.612.570.663; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.3.125.000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.60.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.60.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.56.615.963.463, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.56.615.963.463 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2018	TA 2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	60.267.800	4.829.690	55.438.110	1.147,86
Aset Tetap	56.612.570.663	56.803.283.803	(190.713.140)	(0,33)
Aset Lainnya	3.125.000	3.750.000	(625.000)	(16,66)
Jumlah Aset	56.675.963.463	56.811.863.493	(135.900.030)	(0,23)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	60.000.000	34.086.883	25.913.117	76,02
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	60.000.000	34.086.883	25.913.117	76,02
Ekuitas Dana	56.615.963.463	56.777.776.610	(161.813.147)	(0,28)
Jumlah Ekuitas Dana	56.615.963.463	56.777.776.610	(161.813.147)	(0,28)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	56.675.963.463	56.811.863.493	(135.900.030)	(0,23)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.12.310.830 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.4.581.211.025 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(4.568.900.195), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.(36.000) dan Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp.(4.568.936.195).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp.56.777.776.610 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(4.568.936.195) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.4.407.123.048 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp.56.615.963.463.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	29.652.696	12.310.830	41,52	17.942.529
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		29.652.696	12.310.830	41,52	17.942.529
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	8.199.617.000	3.923.892.630	47,85	3.851.436.584
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.317.125.000	492.916.248	37,42	500.427.450
3.	Belanja Modal	B.2.3.	932.500.000	0	0,00	543.210.000
	Jumlah Belanja Negara		10.449.242.000	4.416.808.878	42,27	4.895.074.034

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NERACA PER 30 JUNI 2018 DAN 2017 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	60.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	1.954.440
Persediaan	C.1. 3.	267.800	2.875.250
Jumlah Aset Lancar		60.267.800	4.829.690
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	49.317.376.000	49.317.376.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.071.768.142	4.069.143.142
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.979.208.000	6.979.208.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	16.025.520	16.025.520
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(3.771.806.999)	(3.578.468.859)
Jumlah Aset Tetap		56.612.570.663	56.803.283.803
Aset Lainnya			
C.4			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	5.000.000	5.000.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(1.875.000)	(1.250.000)
Jumlah Aset Lainnya		3.125.000	3.750.000
Jumlah Aset		56.675.963.463	56.811.863.493
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	34.086.883
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	60.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		60.000.000	34.086.883

Jumlah Kewajiban	60.000.000	25.662.600
EKUITAS		
Ekuitas Dana Lancar	C.6	
Jumlah Ekuitas Dana	56.615.963.463	56.777.776.610
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	56.615.963.463	56.777.776.610

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12.310.830	17.942.472
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.902.148.070	3.840.097.064
Beban Persediaan	D. 3	33.535.650	35.847.950
Beban Barang dan Jasa	D. 4	213.277.192	223.271.775
Beban Pemeliharaan	D. 5	147.597.225	139.480.284
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	90.689.748	96.245.291
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	193.963.140	197.302.424
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4.581.211.025	4.532.244.788
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.568.900.195)	(4.514.302.316)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(36.000)	7.157
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(36.000)	7.157

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(4.568.936.195)	(4.514.295.159)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	56.777.776.610	13.569.479.252
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.568.936.195)	(4.514.295.159)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	(7.012.900)
Jumlah Lain-lain		0	(7.012.900)
Transaksi Antar Entitas	E. 8	4.407.123.048	4.877.131.505
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(161.813.147)	355.823.446
Ekuitas Akhir		56.615.963.463	13.925.302.698

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berdiri pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun dengan wilayah hukum meliputi wilayah Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan Barat, dengan dibentuknya dan diresmikannya cabang Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka pada saat itu relatif kompetensinya diserahkan dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ke cabang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Kemudian pada bulan Agustus 1984, cabang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak secara resmi mulai melaksanakan tugas operasional dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah propinsi Kalimantan Barat. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 252, Pontianak.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA YANG AGUNG", yang bertujuan agar :

1. Para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi,
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan,
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja antara lain persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan, dan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim dengan indikator kinerja berupa persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali,
3. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja antara lain persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis, serta ratio majelis hakim terhadap perkara
4. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan indikator kinerja antara lain persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti,
5. Peningkatan kualitas SDM dengan indikator kinerja antara lain persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 30 Juni Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
 - Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah :
Rp12.310.830

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 12.310.830 atau mencapai 41,52 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 29.652.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Estimasi pendapatan masih menggunakan akun pendapatan yang lama yaitu 423141 untuk pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan dan 423991 untuk penerimaan kembali persekot/uang muka gaji. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, akun pendapatan 423991 berubah menjadi 425131 dan akun pendapatan 423991 berubah menjadi 425991. Pada periode pelaporan ini, revisi atas akun tersebut belum dilakukan karena belum adanya pembaharuan pada aplikasi RKA-KL terkait akun pendapatan baru tersebut. Proses revisi baru dilakukan pada periode pelaporan selanjutnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.150.000	10.356.390	57,06
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	11.502.000	1.954.440	16,99
	Total Pendapatan	29.652.000	12.310.830	41,51

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 Juni TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.5.631.699 atau 31,38 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan dalam penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

dimana hanya terdapat realisasinya pada bulan Januari dan Februari saja. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan aturan tentang angsuran/pengembalian uang muka gaji dari internal Mahkamah Agung RI dimana maksimal hanya 5 kali angsuran tidak lagi 20 kali angsuran. Selain itu juga tidak adanya mutasi masuk pegawai ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.356.390	10.638.812	(282.422)	(2,65)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1.954.440	7.303.660	(5.349.220)	(73,24)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	57	0	0,00
Total Pendapatan		12.310.830	17.942.529	(5.631.699)	(31,38)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
4.416.808.878*

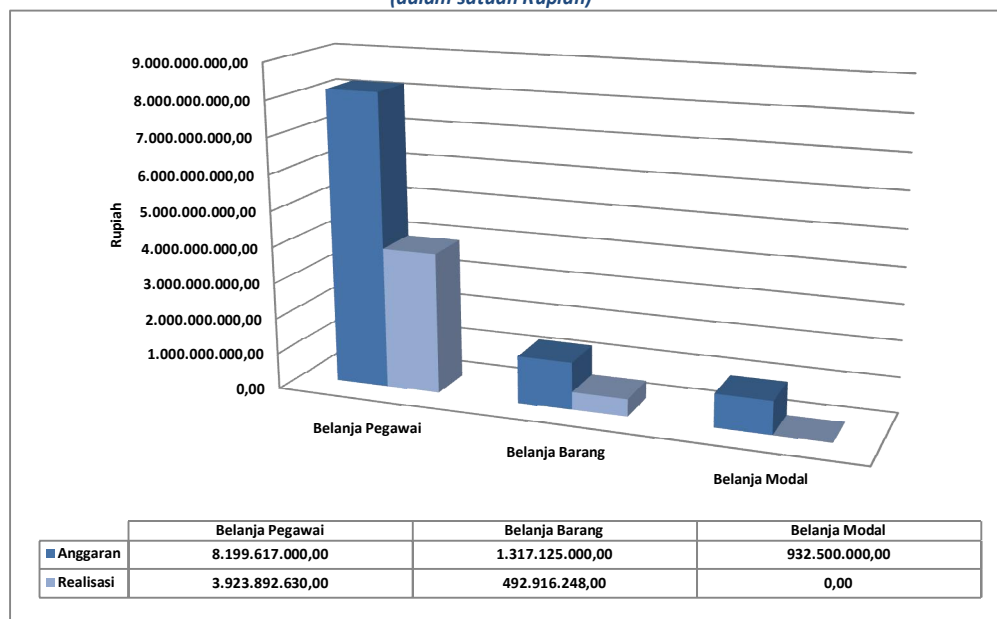
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp.4.416.808.878 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 42,27% dari anggaran senilai Rp. 10.449.242.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.199.617.000	3.923.892.870	47,85
Belanja Barang	1.317.125.000	492.916.248	37,42
Belanja Modal	932.500.000	0	0,00
Total Belanja Bruto	10.449.242.000	4.416.809.118	42,26
Pengembalian Belanja	0	(240)	0
Total Belanja Netto	10.449.242.000	4.416.808.878	42,27

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (478.265.156) atau sebesar (9,77) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena belum ada realisasi belanja modal sampai dengan Semester I TA 2018 ini. Untuk belanja pegawai dan barang realisasinya relatif sama dengan TA 2017.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.923.892.630	3.851.436.584	72.456.046	1,88
Belanja Barang	492.916.248	500.427.450	(7.511.202)	(1,50)
Belanja Modal	0	543.210.000	0	0,00
Total Belanja	4.416.808.878	4.895.074.034	(478.265.156)	(9,77)

B.2.1.

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
3.923.892.630*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp.3.923.892.630 dan Rp.3.851.436.584.

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,88 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan pada TA 2018, kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ke 14 berbeda dari TA 2017. Untuk TA 2018 komponen Tunjangan Hari Raya terdiri dari Gaji Pokok PNS, Tunjangan Suami/Istri PNS, Tunjangan Anak PNS, Tunjangan Struktural dan Fungsional, dan Tunjangan Umum PNS. Sedangkan untuk TA 2017 hanya Gaji Pokok PNS saja.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.080.378.292	1.189.921.900	(109.543.608)	(9,20)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.276	14.679	597	4,06
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.275.060	93.180.150	5.094.910	5,46
Beban Tunj. Anak PNS	29.711.256	23.719.660	5.991.596	25,26
Beban Tunj. Struktural PNS	46.935.000	36.990.000	9.945.000	26,88
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.966.950.000	1.857.900.000	109.050.000	5,86
Beban Tunj. PPh PNS	395.483.686	344.742.234	50.741.452	14,71
Beban Tunj. Beras PNS	57.718.740	58.370.520	(651.780)	(1,11)
Beban Uang Makan PNS	141.266.000	155.228.000	(13.962.000)	(8,99)
Beban Tunjangan Umum PNS	20.615.000	18.470.000	2.145.000	11,61
Beban Tunjangan Kemahalan	64.800.000	72.900.000	(8.100.000)	(11,11)
Hakim				
Total Belanja Brutto	3.923.892.870	3.851.437.143	72.455.727	1,88
Pengembalian Belanja	(240)	(559)	(319)	57,06
Total Belanja Netto	3.923.892.630	3.851.436.584	72.456.046	1,88

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.492.916.24
8*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 492.916.248 dan Rp. 500.427.450.

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 mengalami penurunan sebesar 1,50 persen dibandingkan realisasi belanja barang per 30 Juni TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Penurunan pada komponen belanja bahan dan belanja langganan listrik.
2. Kenaikan pagu belanja barang pada TA 2018 terutama belanja pemeliharaan dan belanja barang operasional.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	169.491.867	148.734.170	20.757.697	13,95
Belanja Barang Non Operasional	11.591.000	33.424.500	(21.833.500)	(65,32)
Belanja Barang Persediaan	31.465.200	33.464.100	(1.998.900)	(5,97)
Belanja Jasa	42.582.208	48.864.605	(6.282.397)	(12,85)
Belanja Pemeliharaan	147.096.225	139.694.784	7.401.441	5,29
Belanja Perjalanan Dinas	90.689.748	96.245.291	(5.555.543)	(5,77)
Total Belanja Brutto	492.916.248	500.427.450	(7.511.202)	(1,50)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	492.916.248	500.427.450	(7.511.202)	(1,50)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp.0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 543.210.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar (100,00) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum keluarnya izin operasional Pengadilan Agama yang baru sehingga untuk pengadaan peralatan fasilitas satker baru dan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi satker baru belum bisa direalisasikan.
2. Sulitnya proses pemilihan barang untuk pengadaan perangkat pengolah data dan pendukung SIPP pada e-katalog dikarenakan pagu anggaran tidak mencukupi untuk memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	498.210.000	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	0	40.000.000	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	5.000.000	0	0,00
Total Belanja Brutto	0	543.210.000	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	543.210.000	0	0,00

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.60.267.800

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.267.800 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	1.954.440
Persediaan	267.800	2.875.250
Total Aset Lancar	60.267.800	4.829.690

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 60.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	31 Desember TA 2017
1.	BRI Acc. No. 0071-01-000772-30-7	0	0
2.	Tunai	6.487.100	0
3.	Kuitansi UP	53.512.900	0
	Jumlah	60.000.000	0

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2018 sebesar Rp.60.000.000 yang terdiri dari saldo kas di brankas sebesar Rp.6.487.100 dan kuitansi UP yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.53.512.900.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp.0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.1.954.440. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	31 Desember TA 2017
1.	Persekot uang muka gaji	0	1.954.440
Jumlah		0	1.954.440

Beban dibayar di muka per 30 Juni TA 2018 sebesar Rp.0. Saldo pada akhir 31 Desember TA 2017 sebesar Rp.1.954.440 yang merupakan persekot uang muka gaji untuk 1 orang pegawai.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.267.800*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.267.800 dan Rp.2.875.250. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	267.800	2.374.250
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	501.000
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		267.800	2.875.250

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik no W14-A/848.A/OT.01.2/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.56.675.963.
463

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp.56.675.963.463 dan Rp.56.811.863.493. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	49.317.376.000	49.317.376.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.071.768.142	4.069.143.142	2.625.000
3	Gedung dan Bangunan	6.979.208.000	6.979.208.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	16.025.520	16.025.520	0
	Jumlah	60.384.377.662	60.381.752.662	2.625.000
	Akumulasi Penyusutan	(3.771.806.999)	(3.578.468.859)	(193.338.140)
	Nilai Buku Aset Tetap	56.612.570.663	56.803.283.803	(190.713.140)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp.49.317.376.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 49.317.376.000 dan Rp. 49.317.376.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	2.01.01.01.001.1	673	3	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Digunakan sendiri; Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua	1.803.656.000
2	2.01.01.01.001.2	447	16	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Digunakan sendiri; Rumah Dinas Panitera Sekretaris	459.772.000
3	2.01.01.01.001.3	1.994	2	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Digunakan sendiri; Rumah Dinas Hakim Tinggi	4.965.050.000
4	2.01.01.01.001.4	156	0001	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Digunakan sendiri; Rumah Dinas Hakim Tinggi	191.178.000
5	2.01.01.04.001.1	2.375	03	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Digunakan sendiri; Gedung Kantor PTA. Pontianak	39.897.720.000
	Jumlah					49.317.376.000

Tidak ada perubahan nilai aset karena tidak ada mutasi baik mutasi tambah maupun mutasi kurang baik berupa pembelian, penghapusan maupun pengembangan. Tanah

tersebut seluas 5.645 m2 digunakan untuk Tanah Kantor seluas 2.375 m2 dan Tanah Rumah Dinas seluas 3.270 m2 di empat lokasi.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin :
Rp.4.048.653.142*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.4.071.768.142 dan Rp.4.069.143.142.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	4.069.143.142
Mutasi Tambah	2.625.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	4.071.768.142
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(3.511.656.277)
Nilai Buku 30 Juni 2018	560.111.865

Mutasi tambah senilai Rp. 2.625.000 berasal dari hibah langsung berupa satu buah Laptop merk Asus X441S. Sedangkan untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk Semester I TA 2018 ini belum terealisasi.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
.6.979.208.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.979.208.000 dan Rp. 6.979.208.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	6.979.208.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	6.979.208.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(260.150.722)
Nilai Buku 30 Juni 2018	6.719.057.278

Tidak ada perubahan nilai aset karena tidak ada mutasi baik mutasi tambah maupun mutasi kurang baik berupa pembelian, penghapusan maupun pengembangan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.16.025.520*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.16.025.520 dan Rp.16.025.520.

Untuk periode 30 Juni TA 2018 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi keluar pada Aset Tetap Lainnya.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp.(3.771.806.99
9)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp.(3.771.806.999) dan Rp.(3.578.468.859).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	49.317.376.000	(3.511.656.277)	45.805.719.723
2	Gedung dan Bangunan	6.979.208.000	(260.150.722)	6.719.057.278
3	Aset Tetap Lainnya	16.025.520	0	16.025.520
Jumlah		56.312.609.520	(3.771.806.999)	52.540.802.521

Aset Lainnya:
Rp .5.000.000

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.5.000.000 dan Rp.5.000.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 18 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Aset tak Berwujud	5.000.000	5.000.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	5.000.000	5.000.000
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset La Lainnya	(1.875.000)	(1.250.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	3.125.000	3.750.000

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp 5.000.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp.5.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi

dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Anti Virus	5.000.000
Jumlah Total		5.000.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berupa software anti virus untuk menunjang operasional kantor dengan masa manfaat 2 tahun.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.60.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.60.000.000 dan Rp.34.086.883. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 20. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	34.086.883
Uang Muka dari KPPN	60.000.000	0
Jumlah	60.000.000	34.086.883

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp.0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.34.086.883. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 60.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp
56.615.963.463*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.56.615.963.463 dan Rp.56.777.776.610. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.12.310.830 dan Rp.17.942.472. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 21 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18.150.000	10.356.390	57,06
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	11.502.696	1.954.440	16,99
Total Pendapatan		29.652.000	12.310.830	41,51

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.3.902.148.070 dan 3.840.097.064. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 22 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.080.378.292	1.201.837.940	(121.459.648)	(10,10)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.036	14.314	722	5,04
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.275.060	94.371.754	3.903.306	4,13
Beban Tunj. Anak PNS	29.711.256	24.196.302	5.514.954	22,79
Beban Tunj. Struktural PNS	46.935.000	36.990.000	9.945.000	26,88
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.966.950.000	1.857.900.000	109.050.000	5,86
Beban Tunj. PPh PNS	395.483.686	344.742.234	50.741.452	14,71
Beban Tunj. Beras PNS	57.718.740	58.370.520	(651.780)	(1,11)
Beban Uang Makan PNS	141.266.000	130.304.000	10.962.000	8,41
Beban Tunjangan Umum PNS	20.615.000	18.470.000	2.145.000	11,61
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	64.800.000	72.900.000	(8.100.000)	(11,11)
Total Beban Pegawai	3.902.148.070	3.840.097.064	62.051.006	1,61

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp.33.535.650*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.33.535.650 dan Rp.35.847.950. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	33.535.650	35.847.950	(2.312.300)	(6,45)
Total Beban Persediaan	33.535.650	35.847.950	(2.312.300)	(6,45)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp.213.277.192*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.213.277.192 dan Rp.223.271.775. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	110.680.767	95.290.000	15.390.767	16,15
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.263.100	3.219.170	43.930	1,36
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27.625.000	27.625.000	0	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	26.100.000	22.600.000	3.500.000	15,48
Beban Bahan	11.591.000	33.424.500	(21.833.500)	(65,32)
Beban Langganan Listrik	31.935.042	38.473.932	(6.538.890)	(16,99)
Beban Langganan Telepon	1.100.883	1.713.573	(612.690)	(35,75)
Beban Langganan Air	981.400	925.600	55.800	6,02
Total Beban Jasa	213.277.192	223.271.775	(9.994.583)	(4,47)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.147.597.225*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.147.597.225 dan Rp.139.480.284. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.318.000	39.798.000	16.520.000	41,50
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10.000.000	18.788.000	(8.788.000)	(46,77)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.778.225	78.608.784	2.169.441	2,75
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	501.000	2.285.500	(1.784.500)	(78,07)
Total Beban Pemeliharaan	147.597.225	139.480.284	(1.784.500)	(80,58)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.90.689.748*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.90.689.748 dan Rp. 96.245.291. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	88.039.748	89.345.291	(1.305.543)	(1,46)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.650.000	6.900.000	(4.250.000)	(61,59)
Total Beban Perjalanan Dinas	90.689.748	96.245.291	(5.555.543)	(5,77)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.193.963.140*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.193.963.140 dan Rp. 197.302.424. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	106.737.369	109.728.244	(2.990.875)	(2,72)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.600.771	86.949.180	(348.409)	(0,40)
Jumlah Penyusutan	193.338.140	196.677.424	(3.339.284)	(1,69)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	625.000	625.000	0	0,00
Jumlah Amortisasi	625.000	625.000	0	0,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	193.963.140	197.302.424	3.339.284	(1,69)

D.9. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

D.10. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.11. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional : Rp.(36.000)

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	142.500	7.157	135.400	(1.807,04)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	178.500	0	178.500	0,00
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(36.000)	7.157	(43.157)	(603,00)

D.12. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah pos luar biasa untuk periode 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan Rp.0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.56.777.776.610 dan Rp.13.569.479.252.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.(4.568.936.195) dan Rp.(4.514.295.159). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.(7.012.900). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.4.407.123.048 dan Rp. 4.877.131.505.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 29 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(12.310.830)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.416.808.878
Jumlah	4.407.123.048

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp.(12.310.830) sedangkan DKEL sebesar Rp.4.416.808.878.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.56.615.963.463 dan Rp.13.925.302.698.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK yang perlu untuk ditindaklanjuti pada periode laporan Semester I 2018 maupun periode sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk Semester I TA 2018.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah antara lain :

1. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-000772-30-7 atas nama BPG 042 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang digunakan sebagai penampung DIPA Badan Urusan Administrasi dengan saldo akhir per 30 Juni 2018 sebesar Rp.0. Rekening dibuka untuk keperluan menampung uang belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-001288-30-1 atas nama BPG 042 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang digunakan sebagai penampung DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan saldo akhir per 30 Juni 2018 sebesar Rp.0. Rekening dibuka untuk keperluan menampung uang belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-001831-30-8 atas nama RPL 042 PTA Pontianak Untuk Biaya Perkara yang digunakan sebagai penampung biaya perkara/titipan pihak ke-3 dengan saldo akhir per 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Selama periode Semester I TA 2018 pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak hanya terdapat satu kali revisi yaitu pada tanggal 9 Maret 2018 berupa pemuktahiran data detail belanja modal.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat ralat SPM pada tanggal 30 April 2018 yaitu SPM Nomor 00001 / SP2D Nomor 180421503000121 tanggal 02 Januari 2018 dan SPM Nomor 00004 / SP2D Nomor 180421503000261 tanggal 01 Februari 2018. Ralat tersebut terkait perubahan segmen akun dimana akun sebelumnya 423141 m3 menjadi 425131 dan akun 423991 menjadi 425991.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat peristiwa atau kejadian penting yang layak diungkapkan dalam Laporan Keuangan Semester I TA 2018.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Tanah						
1	Tanah Persil	-	49.317.376.000	0	0	0	49.317.376.000
B.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	5	276.750.000	71.455.714	17.107.857	88.563.571	188.186.429
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	17	1.351.482.312	1.294.645.564	14.209.187	1.308.854.751	42.627.561
3	Alat Bengkel Bermesin	1	2.530.000	2.277.000	126.500	2.403.500	126.500
4	Alat Kantor	137	463.801.250	397.003.050	8.524.700	405.527.750	58.273.500
5	Alat Rumah Tangga	529	1.235.225.528	1.051.576.528	30.105.000	1.081.681.528	153.544.000
6	Alat Studio	4	11.315.000	11.315.000	0	11.315.000	0
7	Alat Komunikasi	11	40.864.000	36.634.000	470.000	37.104.000	3.760.000
8	Peralatan Pemancar	5	21.030.000	18.067.000	853.500	18.920.500	2.109.500
9	Komputer Unit	50	534.455.302	447.705.302	22.890.625	470.595.927	63.859.375
1	Peralatan Komputer	35	134.154.750	74.079.750	12.450.000	86.529.750	47.625.000

1	Peralatan Olah Raga	1	160.000	160.000	0	160.000	0
C. Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	5.042.266.000	127.057.320	59.222.847	186.280.167	4.855.985.833
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7	1.936.942.000	46.492.631	27.377.924	73.870.555	1.863.071.445
D. Aset Tetap Lainnya							
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	16.025.520	0	0	0	16.025.520
E. Aset Tak Berwujud							
1	Aset Tak Berwujud	3	5.000.000	1.250.000	625.000	1.875.000	3.125.000
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			60.384.377.662	3.578.468.859	193.338.140	3.771.806.999	56.612.570.663
Jumlah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap dan Aset Lainnya			60.389.377.662	3.579.718.859	193.963.140	3.773.681.999	56.615.695.663

